



▶ KESEJAHTERAAN WARGA

Dewan Akan Evaluasi Kartu Menuju Sejahtera

UMBULHARJO—Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja akan mengevaluasi pendataan warga miskin yang menjadi basis program kartu menuju sejahtera (KMS). Alasannya, data tersebut selama ini tidak bisa dijadikan rujukan untuk bantuan program kemiskinan lainnya dari sesama organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jogja maupun dari Pemerintah Pusat.

“Seharusnya KMS ini menjadi basis data semua OPD sehingga sasaran tim penanggulangan kemiskinan jelas,” kata anggota Komisi D DPRD Kota Jogja, Dwi Budi Utomo, Kamis (21/12).

Budi mengatakan selama ini KMS hanya digunakan untuk mengakses bantuan kesehatan dan pendidikan. Namun di saat bersamaan, semua warga Kota Jogja bisa mengakses layanan kesehatan gratis dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) Jogja.

Selain itu, menurut Dwi Budi, pada 2016 lalu Pemerintah Kota Jogja mendapat bantuan jaminan kesehatan melalui iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebanyak 114.000 orang. Namun yang disetujui hanya sekitar 22.000 orang. Padahal data KMS terdapat sekitar 62.000 orang.

“Logikanya kalau kuota 114.000 orang



**KMS
DI KOTA JOGJA**

yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, dalam kesempatan konsultasi Komisi D dengan Kementerian Sosial, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan lembaganya bisa menggunakan basis data hasil survei yang dilakukan daerah, sehingga bantuan kemiskinan bisa tepat sasaran.

Dwi Budi menambahkan Pemerintah Kota Jogja perlu membuat rapor keluarga miskin. Dalam rapor tersebut bisa dilaporkan secara berkala penyebab kemiskinannya apa karena penghasilan, pekerjaan atau tidak memiliki tempat tinggal.

Rapor tersebut nantinya bisa menjadi basis data bagi sejumlah instansi termasuk Pemerintah Pusat dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan.

Adapun, Kepala Dinas Sosial Kota Jogja, Bejo Suwarno menyatakan pihaknya juga berencana mengevaluasi parameter kemiskinan dalam menentukan data KMS. Perubahan parameter tersebut perlu dibahas bersama.

“Nanti kami diskusikan dengan Dewan,” kata dia.

Bejo mengatakan, saat ini parameter KMS masih menggunakan parameter lama. (Ujang Hasanudin)

1) **CARA MEMPEROLEH KMS**

- ☑ Syarat mendapatkan KMS, pemohon harus tercatat sebagai warga Kota Jogja.
- ☑ Jika bukan warga Kota Jogja asli, pemohon harus pindah penduduk dulu sesuai aturan yang berlaku.
- ☑ Setelah menjadi penduduk Kota Jogja, yang dibuktikan tercatat di Kartu Keluarga (KK), pemohon mengisi formulir di RT/RW soal tidak mampu secara ekonomi dan butuh bantuan.
- ☑ Formulir dibawa ke Dinas Sosial untuk dilakukan survei, apakah kondisi pemohon sesuai atau tidak dengan persyaratan yang ditentukan.
- ☑ Penetapan KMS dilakukan dengan uji publik di kelurahan yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat dan ketua RT/RW.

2) **Pemegang KMS**

☑ 2017	18.651 kepala keluarga
☑ 2016	18.730 kepala keluarga
☑ 2015	18.881 kepala keluarga

Data dari berbagai sumber

mestinya semua yang terdaftar KMS bisa masuk, faktanya tidak,” ujar Dwi Budi. Seperti diketahui, bantuan kemiskinan tersebut menggunakan basis data 2013

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005